

## Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan (Studi Di SDN Tonjong 1)

Asep Suhada<sup>1\*</sup>, Ardellina Nur Amelia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik FISIP Universitas Majalengka

\* asepsuhada@unma.ac.id

### ABSTRACT

*This research aims to evaluate the implementation of the Indonesia Smart Card (KIP) program in supporting education equity at SDN Tonjong 1, Majalengka. The KIP program is a government policy designed to assist underprivileged students in continuing their education without financial barriers. This study utilized a qualitative method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the program has been running effectively in several aspects, such as coordination between the school, government, and parents. The socialization of the KIP program was also carried out effectively, although there were still some challenges, such as inconsistencies in beneficiary data, leading to social jealousy in the community. Other challenges include uncertainty in fund disbursement schedules and a lack of supervision over the use of funds by parents. The researcher suggests improvements in monitoring and evaluating the use of KIP funds, as well as enhancing administrative systems to ensure the funds are genuinely used for educational purposes. In conclusion, while the KIP program has a positive impact on helping underprivileged students, several improvements are needed to make the program more effective and on target.*

**Keywords:** Indonesia Smart Card, education equity, socialization, coordination, supervision

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan di SDN Tonjong 1, Majalengka. Program KIP merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa kendala biaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan baik dalam beberapa aspek seperti koordinasi antara sekolah, pemerintah, dan orang tua siswa. Sosialisasi mengenai program KIP juga dilakukan secara efektif, meskipun masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidaksinkronan data penerima manfaat yang menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakpastian jadwal pencairan dana serta kurangnya pengawasan dalam penggunaan dana oleh orang tua siswa. Peneliti menyarankan adanya peningkatan dalam hal monitoring dan evaluasi penggunaan dana KIP serta perbaikan dalam sistem administrasi untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan pendidikan. Kesimpulannya, meskipun KIP memberikan dampak positif dalam membantu siswa kurang mampu, diperlukan beberapa perbaikan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** human relations, kinerja pegawai, Puskesmas, hubungan interpersonal, manajemen sumber daya manusia

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dalam berbagai aspek, termasuk kecerdasan, akhlak, keterampilan, dan kepribadian, sehingga individu mampu hidup secara bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat (Muhammad Saroni, 2013). Pendidikan menjadi sangat penting dalam menciptakan generasi yang terdidik dan siap menghadapi tantangan global. Dengan adanya pendidikan, diharapkan setiap individu mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, sekaligus mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial (Agustino, 2006).

Namun, masalah pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Menurut Rohman (2009), masalah pemerataan pendidikan muncul karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan wajib dilakukan secara merata oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan status sosial atau ekonomi (Rohman, 2009; Subarsono, 2005).

Dalam rangka mengatasi kesenjangan pendidikan, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi (Joko Widodo, 2006). Program ini diharapkan mampu mencegah putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin (Winda Yanti, 2018).

KIP diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016, yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, seperti perlengkapan sekolah, biaya transportasi, dan uang saku (Seniati, 2021). Program ini juga merupakan bagian dari

strategi pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas, dengan harapan generasi muda Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global melalui pendidikan yang memadai (Muhammad Rifai, 2011).

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi program ini, terutama terkait dengan ketepatan sasaran penerima manfaat dan pengawasan penggunaan dana KIP. Menurut Herlina (2017), salah satu masalah utama dalam implementasi KIP adalah sulitnya pengawasan terhadap penggunaan dana oleh penerima, karena pencairan dana dilakukan langsung melalui rekening peserta didik. Akibatnya, dana sering kali tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan untuk kebutuhan pribadi di luar pendidikan.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tonjong 1 di Kecamatan Majalengka merupakan salah satu sekolah yang memiliki siswa penerima KIP. Dengan 97 siswa penerima KIP, sekolah ini menjadi contoh bagaimana implementasi program tersebut berjalan di lapangan. Namun, seperti halnya di tempat lain, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa dana KIP digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan siswa (Malo, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SDN Tonjong 1 dalam upaya pemerataan pendidikan, dengan fokus pada efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Tonjong 1, Majalengka. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Hadi Sutrisno (dalam Kerlinger, 2020), penelitian adalah upaya menemukan, mengembangkan, dan menguji pengetahuan melalui metode ilmiah. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang deskriptif dan eksploratif, memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana Program KIP diimplementasikan, bagaimana pengaruhnya terhadap pemerataan pendidikan, serta

kendala apa saja yang muncul dalam proses tersebut. Penelitian ini tidak hanya fokus pada pengumpulan data secara faktual tetapi juga menganalisis secara mendalam konteks sosial dan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang holistik tentang implementasi kebijakan.

Lokasi penelitian difokuskan pada SDN Tonjong 1 yang dipilih karena sekolah ini memiliki cukup banyak penerima KIP dan masih terdapat beberapa kasus penerima yang dianggap tidak tepat sasaran. Lokasi ini penting karena penelitian bertujuan untuk menilai bagaimana Program KIP dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah. Selain itu, SDN Tonjong 1 memiliki data yang dapat menggambarkan secara baik proses implementasi KIP, mulai dari pengajuan, penentuan penerima, pencairan dana, hingga pemanfaatan dana KIP oleh siswa. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi daerah tersebut yang cukup relevan dengan tujuan penelitian. Melalui lokasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai pelaksanaan KIP di tingkat sekolah dasar serta bagaimana program ini berperan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu, penelitian di SDN Tonjong 1 diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang efektivitas Program KIP.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, koordinator KIP, wali kelas, serta orang tua siswa penerima KIP di SDN Tonjong 1. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pemahaman dan pemanfaatan program di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi seperti laporan sekolah, data penerima KIP, dan literatur yang terkait dengan kebijakan pendidikan, termasuk peraturan tentang KIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan observasi non-partisipan untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan tanpa ikut terlibat dalam aktivitas yang diamati, sehingga data yang diperoleh lebih objektif. Selanjutnya, data dianalisis

menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang muncul dari data lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan di SDN Tonjong 1. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami efektivitas, tantangan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi KIP di sekolah ini mencakup beberapa aspek kunci seperti koordinasi, sosialisasi, pemahaman masyarakat, dan penggunaan dana yang telah diinstruksikan.

Dari segi koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder), penelitian ini menemukan bahwa adanya koordinasi yang baik antara pihak sekolah, pemerintah, dan orang tua sangat membantu kelancaran program. Kepala Sekolah SDN Tonjong 1 menyatakan bahwa peran operator sekolah dalam memberikan informasi terkait KIP kepada penerima dana sangatlah penting. Selain itu, orang tua siswa juga merasa bahwa informasi yang disampaikan sekolah terkait dengan jadwal pencairan dana dan cara penggunaan dana KIP sangat jelas dan mudah dipahami. Koordinasi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa kendala finansial.

Selain itu, sosialisasi mengenai Program KIP juga dilaksanakan secara teratur setiap tahun ajaran baru serta pada saat pembagian rapor. Sosialisasi dilakukan kepada siswa dan orang tua, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai manfaat dan mekanisme penggunaan dana KIP. Dari wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah cukup efektif. Orang tua penerima KIP memahami bahwa dana tersebut harus digunakan untuk

keperluan pendidikan seperti pembelian alat tulis, seragam, dan biaya transportasi. Namun, meskipun sosialisasi berjalan lancar, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksinkronan data penerima yang menyebabkan kecemburuan sosial di antara masyarakat yang merasa berhak namun tidak menerima bantuan.

Terkait dengan mekanisme pengambilan dana, peneliti menemukan bahwa proses pencairan dilakukan melalui Bank BRI dengan pengawasan dari orang tua siswa. Pihak sekolah berperan dalam memberikan informasi kepada siswa dan orang tua mengenai waktu pencairan dana. Meski demikian, terdapat beberapa kendala dalam hal ini, yaitu jadwal pencairan yang tidak menentu dan sering berubah, serta kurangnya pemberitahuan informasi pencairan dari pusat. Hal ini menyebabkan kebingungan di antara orang tua siswa mengenai kapan dana akan tersedia. Dalam beberapa kasus, orang tua harus melakukan pengecekan berkala ke bank untuk memastikan dana sudah masuk ke rekening siswa.

Dalam hal penggunaan dana, penelitian ini mengungkap bahwa sebagian besar orang tua memahami dan menggunakan dana KIP sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk menunjang keperluan sekolah anak-anak mereka. Dana digunakan untuk membeli seragam, buku, alat tulis, dan membayar biaya transportasi ke sekolah. Namun, masih ada kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang memadai, dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan di luar pendidikan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar sekolah dan pemerintah lebih intensif dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana KIP.

Faktor penghambat lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana dari orang tua siswa. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pencairan dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa tanpa pengawasan ketat dari sekolah. Akibatnya, sekolah tidak dapat memastikan apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menyarankan agar dibuat sistem pelaporan yang lebih terstruktur, di mana orang tua diwajibkan untuk menyerahkan bukti penggunaan dana kepada sekolah.

Secara keseluruhan, implementasi Program KIP di SDN Tonjong 1 telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diperbaiki. Pemerintah dan pihak sekolah perlu terus meningkatkan koordinasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan utamanya, yaitu pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Perbaikan sistem pendataan dan penjadwalan pencairan dana juga perlu dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dan memastikan bahwa dana KIP tepat sasaran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan sangat penting dalam keberhasilan implementasi Program KIP. Menurut pandangan peneliti, peran operator sekolah dan keterlibatan aktif orang tua dalam memahami dan mengelola program ini berperan krusial untuk memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Tanpa keterlibatan aktif tersebut, pelaksanaan program berpotensi tidak efektif, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat.

Selanjutnya, peneliti berpendapat bahwa meskipun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua dan siswa sudah berjalan dengan baik, masih ada ruang untuk peningkatan. Sosialisasi yang melibatkan lebih banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga lokal, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi serta memperbaiki ketidaksinkronan data penerima manfaat yang sering menjadi sumber kecemburuan sosial. Langkah ini akan membantu memperkuat penerimaan program oleh masyarakat dan memastikan bahwa program KIP benar-benar tepat sasaran.

Dalam pandangan peneliti, penundaan jadwal pencairan dana yang tidak menentu menunjukkan adanya masalah pada sistem administrasi di tingkat pusat. Hal ini mempengaruhi kepercayaan orang tua terhadap program ini. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pencairan dana, khususnya dalam hal pemberitahuan yang lebih terstruktur dan tepat waktu. Sistem pencairan yang lebih teratur akan memberikan kepastian kepada orang tua dan memungkinkan mereka merencanakan keperluan pendidikan anak-anak mereka dengan lebih baik.

Meskipun sebagian besar orang tua menggunakan dana KIP sesuai dengan tujuan, peneliti juga menyoroti bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana masih menjadi tantangan yang signifikan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, terdapat potensi penyalahgunaan dana untuk keperluan di luar pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sekolah untuk meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi, sehingga dapat dipastikan bahwa dana digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa secara optimal.

Terakhir, peneliti juga menekankan bahwa pelaporan penggunaan dana harus menjadi prioritas dalam memperbaiki mekanisme implementasi KIP. Dengan mewajibkan orang tua untuk menyerahkan bukti penggunaan dana, program ini akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga akan membantu pemerintah dan sekolah dalam mengevaluasi keberhasilan program serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan di masa depan, memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Tonjong 1 menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, terutama antara sekolah, pemerintah, dan orang tua, berperan sangat penting dalam memastikan kelancaran program. Keterlibatan aktif pihak sekolah, khususnya operator sekolah, dalam menyampaikan informasi terkait program dan mekanisme pencairan dana kepada orang tua, telah membantu memperlancar pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi yang baik ini memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih baik di kalangan orang tua mengenai penggunaan dana KIP sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa. Namun, kendala terkait penjadwalan pencairan dana yang sering tidak menentu dan perubahan mendadak dari pusat masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa dan orang tua juga berjalan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala terkait ketidaksinkronan data penerima manfaat yang menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar orang tua penerima KIP memahami bahwa dana tersebut harus digunakan untuk keperluan pendidikan seperti pembelian alat tulis, seragam, dan biaya transportasi ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sosialisasi yang dilakukan sudah mencapai target, tetapi peneliti berpendapat bahwa perlu ada perbaikan dalam aspek pendataan dan peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat atau lembaga lokal untuk mengurangi potensi kesenjangan informasi dan kecemburuan sosial.

Kesimpulannya, meskipun Program KIP telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu di SDN Tonjong 1 untuk mendapatkan pendidikan yang layak, masih ada ruang untuk perbaikan. Perlu ada peningkatan dalam hal monitoring penggunaan dana, pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana KIP oleh orang tua, serta pelaporan yang lebih terstruktur dan transparan. Selain itu, perbaikan dalam sistem administrasi, khususnya dalam hal penjadwalan pencairan dana dan sosialisasi yang lebih melibatkan banyak pihak, akan sangat membantu dalam memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan berjalan dengan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Agustino. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arif Rohman. 2001. Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi. Yogyakarta: aswaja pressindo.
- Herlina. 2017. Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Model Kerjasama Usaha Menengah Kecil Dan Mikro Dengan Usaha Besar Di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- joko widodo. 2006. Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. malang: bayumedia publishing.
- Kerlinger. 2020. Metode Penelitian Administrasi Publik. Malo, Manasse. 2020. Penelitian Administrasi Publik.
- Muhammad Rifai. 2011. Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhamsmad Saroni. 2013. Pendidikan Untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan Dalam Kesempatan Berpendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rohman. 2009. Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan. laksbang mediatama.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.

**Jurnal-jurnal:**

Winda Yanti. (2018). Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan. Jurnal. Universitas Medan Area.

Seniati. (2021). Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Di Sekolah Menengah Atas Negeri Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Jurnal. Universitas Islam Riau.

**Undang-Undang:**

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Pendidikan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Propernas Tahun 2000-2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai Kebijakan Pembangunan Pendidikan